

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV 2025

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Sumatera IV



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Triwulan IV Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV Tahun Anggaran 2025 dengan baik.

Dokumen Laporan Kinerja Triwulan BP3KP Sumatera IV memuat Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Target Kinerja, Capaian Target, Permasalahan atau Potensi Capaian Triwulan BP3KP Sumatera IV serta Rencana Tindak Lanjut atas permasalahan pada triwulan sebelumnya. Laporan Kinerja Triwulan yang disusun oleh BP3KP Sumatera IV menggambarkan capaian terhadap 5 (lima) Unit Organisasi yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Hasil dari Laporan Kinerja Triwulan BP3KP Sumatera IV ini selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan LAKIN Tahun 2025 BP3KP Sumatera IV. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas tersajinya laporan ini. Untuk semua masukan dan koreksi akan kami jadikan perbaikan dalam penyusunan laporan pada periode selanjutnya.

Jambi, 31 Desember 2025

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumatera IV,



Ir. Arifman, S.T., M.M., M.T.
NIP 19750922 200212 1 003

KEPALA BALAI P3KP SUMATERA IV

IR. M. ARIFMAN S.T, M.T.



DAFTAR ISI

COVER.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Tugas Dan Fungsi.....	7
1.3 Struktur Organisasi	8
BAB II CAPAIAN KINERJA	11
2.1 Target Kinerja TW I / II / III / IV	11
2.1.1 Target Kinerja DIPA Sekretariat Jenderal	11
2.1.2 Target Kinerja DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.....	12
2.1.3 Target Kinerja DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	13
2.1.4 Target Kinerja DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	13
2.1.5 Target Kinerja DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	14
2.2 Capaian Target Kinerja Triwulan - IV	14
2.2.1 Capaian Target TW-IV DIPA Sekretariat Jenderal	14
2.2.2 Capaian Target TW - IV DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	15
2.2.3 Capaian Target TW - IV DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	16
2.3 Permasalahan /Potensi Capaian Triwulan IV	
2.4. Realisasi Terhadap Target Renstra 2025.....	
BAB III PENUTUP.....	
3.1 Rencana dan Tindak Lanjut	
LAMPIRAN	





BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan instansi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai panduan dan aturan yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan.

Proses monitoring dan evaluasi merupakan pengendalian yakni bagian tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Monitoring atau pemantauan dapat mempermudah kita dalam mengamati terus – menerus *trend* dan masalah, dan bila perlu melakukan penyesuaian dalam rencana implementasi atau proses pengelolaan secara tepat waktu. Evaluasi tidak hanya dapat mengidentifikasi hasil – hasil program, tetapi juga dapat menyediakan informasi mengenai kapan, mengapa, dan bagaimana implementasi program yang tidak tepat dari rencana semula dan kemudian menyajikan rekomendasi untuk mengatasi masalah itu.

Upaya monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melakukan pendampingan dan pengarahan kepada pemangku kepentingan setempat. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung dan menyukseskan kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Unit Kerja Triwulan IV Tahun 2025.

Monitoring dan Evaluasi di lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran yang sesuai kondisi di lapangan dan langsung mengenai perkembangan pelaksanaan Kegiatan Randal terutama Kegiatan Fisik diantaranya, Rumah Swadaya, Rumah Susun, Rumah Khusus dan Rumah Umum dan Komersial, serta kendala – kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Langkah yang diambil dalam mengatasi kendala – kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan sehingga diharapkan dari hasil kegiatan pembangunan fisik berjalan dengan sesuai rencana. Hasil monitoring dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan saran, masukan dan rekomendasi dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul dan upaya – upaya untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan agar dapat dicapai pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

Dengan diadakan monitoring dan evaluasi kinerja unit kerja Triwulan IV Tahun 2025 ini diharapkan semua pembangunan rumah swadaya, rumah susun dan rumah khusus, PSU, yang tersebar di Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu dapat di pantau secara berkala, berjenjang guna agar tercapainya pembangunan tepat waktu dan masukan kebijakan perencanaan pembangunan selanjutnya.

1.2 Tugas Dan Fungsi

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial, dan fasilitasi serah terima aset. Dalam menjalankan tugasnya BP3KP Sumatera IV menjalankan fungsi:

1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
2. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
3. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
4. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
6. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
7. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
8. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
9. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
10. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
11. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
12. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
13. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;

14. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
15. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

1.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi UPT, dalam hal ini Balai, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) , yaitu terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Tata Usah
2. Seksi Pelaksanaan Wilayah I;
3. Seksi Pelaksanaan Wilayah II; dan
4. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

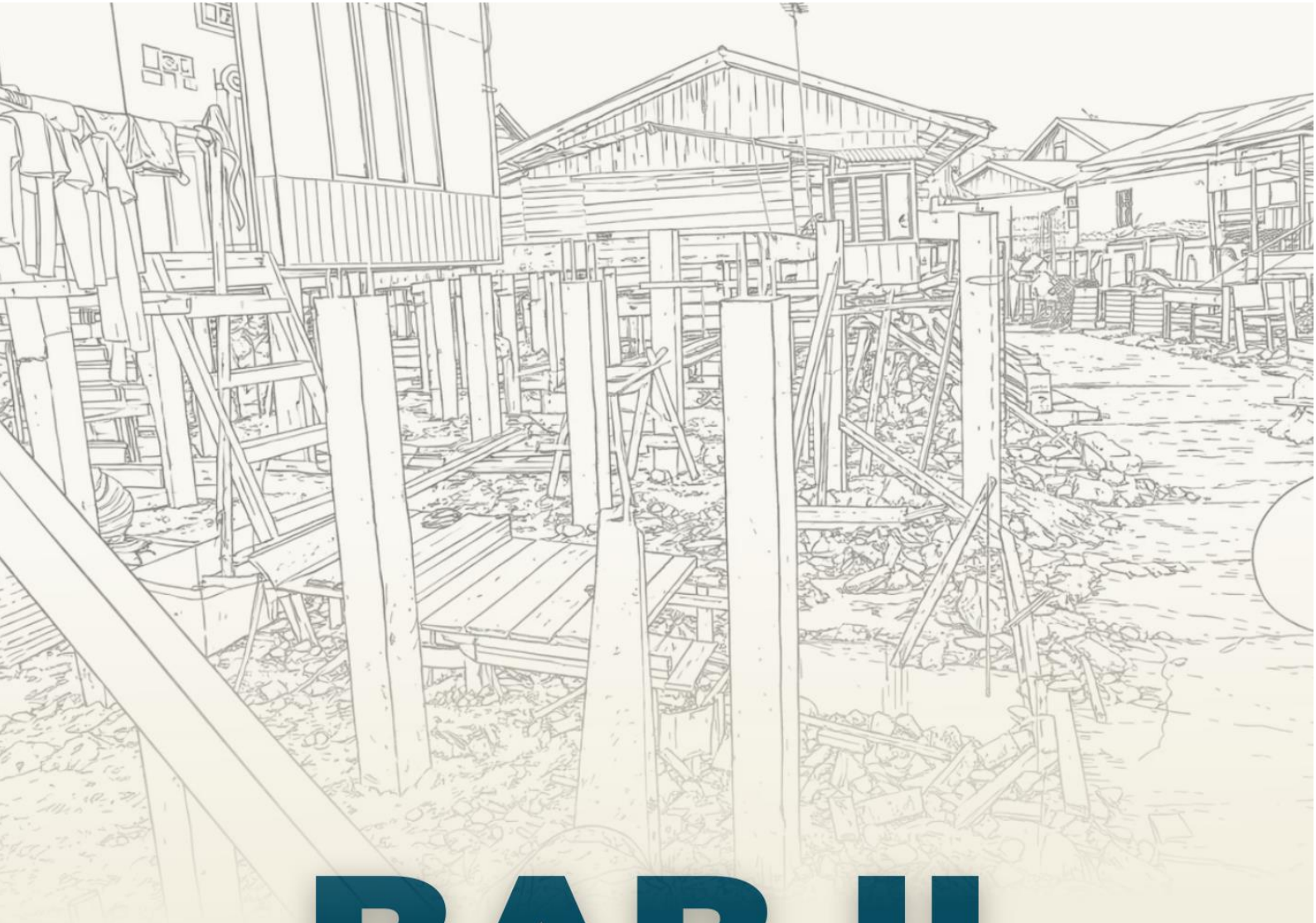


Gambar 1.3. 1 Struktur Organisasi BP3KP Sumatera IV

Sumber: Data BP3KP Sumatera IV

Susunan Organisasi dan Tugas Jabatan pada BP3KP Sumatera IV, yaitu:

No	Jabatan	Tugas
1	Kepala Balai	Penanggungjawab utama atas seluruh pelaksana tugas dan fungsi BP3KP di wilayah kerja Sumatera IV.
2	Subbagian Umum dan Tata Usaha	a. Melaksanakan penyusunan program dan anggaran; b. Melakukan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia; c. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan; d. Melakukan pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas; e. Melakukan koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.
3	Seksi Pelaksana Wilayah I	a. Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial; dan b. Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksana pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitas penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan dan pesisir.
4	Seksi Pelaksana Wilayah II	Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitas penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.
5	Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	Memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



BAB II

CAPAIAN KINERJA



BAB II

CAPAIAN KINERJA

Tahun 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV memiliki 5 (lima) DIPA yaitu DIPA Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Resiko. Sedangkan Satker PKP Provinsi Bengkulu dan Satker PKP Provinsi Jambi memiliki 4 (empat) DIPA yang sama dengan Balai kecuali DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Resiko. Rincian Kode Satker tiap DIPA dapat dilihat pada tabel berikut:

BALAI / SATKER	KODE SATKER / DIPA				
	SEKJEN	DITJEN KP	DITJEN PERDESAAN	DITJEN PERKOTAAN	DITJEN TKPR
BP3KP SUMATERA IV	691387	691441	691495	691549	691598
SATKER PKP PROVINSI BENGKULU	691389	691443	691497	691551	
SATKER PKP PROVINSI JAMBI	691388	691442	691496	691550	

Sumber : Analisis BP3KP Sum IV

2.1 Target Kinerja TW I / II / III / IV

Target Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV yang tertuang didalam Dokumen Rencana Aksi Tahun 2025 merupakan gabungan target kinerja untuk BP3KP Sumatera IV, Satker PKP Provinsi Bengkulu dan Satker PKP Provinsi Jambi. Berikut penjelasan mengenai Target Kinerja Tahun 2025 yang tertuang dalam Dokumen Rencana Aksi.

2.1.1 Target Kinerja DIPA Sekretariat Jenderal

Pada Triwulan IV, Target Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV untuk Sekretariat Jenderal merujuk pada Dokumen Rencana Aksi Tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut:



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target PK	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
Program Sekretariat Jenderal							
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	3 Layanan	0%	0%	20%	100%

Sumber : Olahan Data Renaksi BP3KP Sumatera IV

Target Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Sekretariat Jenderal di Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar 100% terhadap Target Perjanjian Kinerja Akhir Sekretariat Jenderal tanggal 10 Desember 2025. Indikator Kinerja berupa Tingkat Layanan Dukungan Manajemen dari unsur BP3KP Sumatera IV, Satker PKP Bengkulu dan Satker PKP Jambi.

2.1.2 Target Kinerja DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Pada Triwulan IV, Target Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV untuk Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman merujuk pada Dokumen Rencana Aksi Tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target PK	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
Program Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman							
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	Jumlah Laporan Kebijakan teknis p enyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	1 Laporan	0%	0%	20%	100%
		Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan	0%	0%	20%	100%
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	3 Laporan	0%	0%	20%	100%
		Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	327 Unit	0%	0%	20%	100%
		Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	0,10 Hektar	0%	0%	20%	100%

Sumber : Olahan Data Renaksi BP3KP Sumatera IV

Target Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman di Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar 100% terhadap Target Perjanjian Kinerja Akhir Ditjen Kawasan Permukiman tanggal 10 Desember 2025. Target Kinerja Ditjen Kawasan Permukiman terdiri dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 5 (lima) Indikator Kinerja.

2.1.3 Target Kinerja DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Pada Triwulan IV, Target Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV untuk Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan merujuk pada Dokumen Rencana Aksi Tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target PK	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
Program Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan							
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	Jumlah kegiatan Koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Kegiatan	0%	0%	20%	100%
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	2 Laporan	0%	0%	20%	100%
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Unit Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	1040 Unit	0%	0%	20%	100%

Sumber : Olahan Data Renaksi BP3KP Sumatera IV

Target Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan di Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar 100% terhadap Target Perjanjian Kinerja Akhir Ditjen Perumahan Perdesaan tanggal 10 Desember 2025. Target Kinerja Ditjen Perumahan Perdesaan terdiri dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 3 (tiga) Indikator Kinerja.

2.1.4 Target Kinerja DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Pada Triwulan IV, Target Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV untuk Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan merujuk pada Dokumen Rencana Aksi Tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target PK	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
Program Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan							
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Jumlah laporan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan.	1 Laporan	0%	0%	20%	100%
		Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	3 Laporan	0%	0%	20%	100%
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	Jumlah Laporan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	1 Laporan	0%	0%	20%	100%
		Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	1 Unit	0%	0%	20%	100%
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Laporan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	1 Laporan	0%	0%	20%	100%
		Jumlah unit Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Perkotaan	281 Unit	0%	0%	20%	100%

Sumber : Olahan Data Renaksi BP3KP Sumatera IV

Target Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan di Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar 100% terhadap Target Perjanjian Kinerja Akhir Ditjen Perumahan Perkotaan tanggal 10 Desember 2025. Target Kinerja Ditjen Perumahan Perkotaan terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 6 (enam) Indikator Kinerja.



2.1.5 Target Kinerja DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Pada Triwulan IV, Target Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV untuk Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko merujuk pada Dokumen Rencana Aksi Tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target PK	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
Program Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko							
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan	0%	0%	20%	100%
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan	0%	0%	20%	100%

Sumber : Olahan Data Renaksi BP3KP Sumatera IV

Target Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko di Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar 100% terhadap Target Perjanjian Kinerja Akhir Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tanggal 10 Desember 2025. Target Kinerja Ditjen Perumahan Perkotaan terdiri dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 2 (dua) Indikator Kinerja.

2.2 Capaian Kinerja Triwulan - IV

Capaian target kinerja menggambarkan capaian kinerja khususnya pada triwulan IV terhadap target PK maupun terhadap target yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi 2025 yang sudah dibahas sebelumnya. Capaian target meliputi capaian kinerja program dan capaian kinerja kegiatan yang merujuk pada target yang tertuang pada PK terakhir dalam triwulan IV. Berikut ini adalah gambaran capaian triwulan IV pada unit kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV.

2.2.1 Capaian Target TW-IV DIPA Sekretariat Jenderal

Capaian Kinerja TW-IV BP3KP Sumatera IV pada DIPA Sekretariat Jenderal dinilai terhadap Target Perjanjian Kinerja Akhir. Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV pada Triwulan IV Adalah sebesar 89,08%.

Tabel. 2.7. Capaian Kinerja Triwulan IV BP3KP Sumatera IV (DIPA Sekretariat Jenderal)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	TW-IV					
				Target	PAGU TW-IV	RENCANA	%	CAPAIAN	%
Program Sekretariat Jenderal			Layanan	3	2.209.986.000	1.952.461.117	88,35	1.968.648.901	89,08
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	Layanan	3	2.209.986.000	1.952.461.117	88,35	1.968.648.901	89,08
		Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	935.918.000	861.044.560	92,00	863.041.910	92,21
		Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	625.831.000	527.450.367	84,28	543.002.099	86,76
		Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	648.237.000	563.966.190	87,00	562.604.892	86,79

Sumber : Analisis 2025



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbandingan antara Target dan Capaian kinerja pada Triwulan IV. Target Kinerja untuk DIPA Sekretariat Jenderal pada Triwulan IV ditetapkan sebesar 88,35%, dengan capaian per 31 Desember 2025 sebesar 89,08%. Terdapat selisih antara capaian dan target sebesar + 0,73% melebihi rencana, dengan kata lain target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi pada Triwulan IV sudah tercapai.

2.2.2 Capaian Target TW - IV DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman di Triwulan IV Tahun 2025 dinilai terhadap Target Perjanjian Kinerja Akhir Ditjen Kawasan Permukiman. Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV pada Triwulan IV adalah sebesar 98,52%.

Tabel 2.7 Capaian Kinerja Triwulan IV BP3KP Sumatera IV (DIPA Ditjen Kawasan Permukiman)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	TW-IV					
				Target	PAGU TW-IV	RENCANA	%	CAPAIAN	%
Program Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman				8.601.428.000		8.478.448.080	98,57	8.474.463.747	98,52
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	Jumlah Laporan Kebijakan teknis penyelenggaraan kli	Laporan	1	50.000.000	42.500.000	85,00	42.759.060	85,52
		Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	50.000.000	42.500.000	85,00	42.759.060	85,52
		Jumlah Laporan Pemantau an, Evaluasi dan Pelapora n Kegiatan Tematik Penyel enggaran Kawasan Permu kiman dan Akuntabilitas Ki nerja	Laporan	1	84.310.000	59.860.100	71,00	59.634.952	70,73
		Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	84.310.000	59.860.100	71,00	59.634.952	70,73
2	Meningkatnya ketersediaa n rumah layak huni di kaw asan permukiman	Jumlah Laporan Pemantau an dan Evaluasi Pemantau an, Evaluasi dan Pelapora n Pembangunan Rusun, Pe ningkatan Kualitas dan Pe nganganan Kumuh	Laporan	3	496.440.000	405.409.980	81,66	405.771.766	81,74
		Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	330.300.000	274.149.000	83,00	275.489.934	83,41
		Satker PKP Prov. Bengkulu	Laporan	1	85.026.000	85.026.000	98,00	83.633.170	98,36
		Satker PKP Prov. Jambi	Laporan	1	81.114.000	46.234.980	57,00	46.648.662	57,51
		Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	327	7.403.877.000	7.403.877.000	100	7.403.692.384	100
		Satker PKP Prov. Bengkulu	Unit	59	1.453.843.000	1.453.843.000	100	1.453.658.384	99,99
		Satker PKP Prov. Jambi	Unit	268	5.950.034.000	5.950.034.000	100	5.950.034.000	100
		Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Ha	0,1	566.801.000	566.801.000	100	562.605.585	99,26
		Satker PKP Prov. Bengkulu	Ha	0,1	566.801.000	566.801.000	100	562.605.585	99,26

Sumber : Analisis 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbandingan antara Target dan Capaian kinerja pada Triwulan IV. Target Kinerja untuk DIPA Ditjen Kawasan Permukiman pada Triwulan IV ditetapkan sebesar 98,57%, dengan capaian per 31 Desember 2025 sebesar 98,52%. Terdapat selisih antara capaian dan target sebesar -0,39% dibawah



rencana, dengan kata lain target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi pada Triwulan IV masih belum tercapai, tetap perlu dilakukan evaluasi ke depannya sebagai langkah optimalisasi penyerapan anggaran.

2.2.3 Capaian Target TW - IV DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan di Triwulan IV Tahun 2025 dinilai terhadap Target Perjanjian Kinerja Akhir Ditjen Perumahan Perdesaan. Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV pada Triwulan IV adalah sebesar 98,84%.

Tabel 2.8 Capaian Kinerja Triwulan IV BP3KP Sumatera IV (DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	TW-IV					
				Target	PAGU TW-IV	RENCANA	%	CAPAIAN	%
Program Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan					23.060.206.000	22.882.617.500	99,23	22.791.739.947	98,84
1	Meningkatnya kinerja ketepatan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	Jumlah kegiatan Koordinasi penyelenggaraan perumahan	Kegiatan	1	171.176.000	128.382.000	75	130.165.288	76,04
		Balai P3KP Sumatera IV	Kegiatan	1	171.176.000	128.382.000	75	130.165.288	76,04
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	3	491.994.000	357.199.500	72,60	264.538.659	53,77
		Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	137.896.000	75.842.800	55	77.573.095	56,25
		Satker PKP Prov. Bengkulu	Laporan	1	111.627.000	111.627.000	100	111.627.000	100
		Satker PKP Prov. Jambi	Laporan	1	242.471.000	169.729.700	70	75.338.564	31,07
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Unit Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	Unit	1040	22.397.036.000	22.397.036.000	100	22.397.036.000	100
		Satker PKP Prov. Jambi	Unit	1040	22.397.036.000	22.397.036.000	100	22.397.036.000	100

Sumber : Analisis 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbandingan antara Target dan Capaian kinerja pada Triwulan IV. Target Kinerja untuk DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan pada Triwulan IV ditetapkan sebesar 99,23%, dengan capaian per 31 Desember 2025 sebesar 98,84%. Terdapat selisih antara capaian dan target sebesar -0,39% dibawah rencana, dengan kata lain target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi pada Triwulan IV masih belum tercapai, tetap perlu dilakukan evaluasi ke depannya sebagai langkah optimalisasi penyerapan anggaran.

2.2.4 Capaian Target TW - IV DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan di Triwulan IV Tahun 2025 dinilai terhadap Target Perjanjian Kinerja Akhir Ditjen Perumahan Perkotaan. Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV pada Triwulan IV adalah sebesar 98,84%.



Tabel 2.8 Capaian Kinerja Triwulan IV BP3KP Sumatera IV (DIPA Ditjen
Perumahan Perkotaan)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	TW-IV					
				Target	PAGU TW-IV	RENCANA	%	CAPAIAN	%
Program Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan					9.697.382.000	8.827.251.260	91,03	8.826.834.224	91,02
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Jumlah laporan, strategi dan program prioritas penyele	Laporan	1	366.720.000	209.030.400	57,00	212.615.666	57,98
		Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	366.720.000	209.030.400	57,00	212.615.666	57,98
		Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	3	1.231.446.000	918.141.060	74,56	917.997.097	74,55
		Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	220.942.000	95.005.060	43,00	95.161.295	43,07
		Satker PKP Prov. Bengkulu	Laporan	1	504.104.000	504.104.000	100,00	499.701.961	99,13
		Satker PKP Prov. Jambi	Laporan	1	506.400.000	319.032.000	63,00	323.133.841	63,81
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	Jumlah Laporan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Laporan	1	201.809.000	0	0	0	0
		Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	201.809.000	0	0	0	0
		Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	1	1.352.231.000	1.352.231.000	100	1.352.231.000	100
		Satker PKP Prov. Jambi	Unit	1	1.352.231.000	1.352.231.000	100	1.352.231.000	100
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Laporan penyelenggaraan peningkatan kualitas	Laporan	1	281.896.000	84.568.800	30,00	85.866.929	30,46
		Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	281.896.000	84.568.800	30,00	85.866.929	30,46
		Jumlah unit Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Perkotaan	Unit	284	6.263.280.000	6.263.280.000	100	6.258.123.532	99,92
		Satker PKP Prov. Bengkulu	Unit	62	1.454.470.000	1.454.470.000	100	1.449.313.532	99,65
		Satker PKP Prov. Jambi	Unit	222	4.808.810.000			4.808.810.000	100

Sumber : Analisis 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbandingan antara Target dan Capaian kinerja pada Triwulan IV. Target Kinerja untuk DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan pada Triwulan IV ditetapkan sebesar 91,03%, dengan capaian per 31 Desember 2025 sebesar 91,02%. Terdapat selisih antara capaian dan target sebesar -0,004% dibawah rencana, dengan kata lain target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi pada Triwulan IV masih belum tercapai, tetap perlu dilakukan evaluasi ke depannya sebagai langkah optimalisasi penyerapan anggaran.

2.2.5 Capaian Target TW - IV DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko di Triwulan IV Tahun 2025 dinilai terhadap Target Perjanjian Kinerja Akhir Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV pada Triwulan IV adalah sebesar 98,31%.

Tabel 2.9 Capaian Kinerja Triwulan IV BP3KP Sumatera IV (DIPA Ditjen Tata
Kelola dan Pengendalian Risiko)



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	TW-IV					
				Target	PAGU TW-IV	RENCANA	%	CAPAIAN	%
Program Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko				2	303.466.000	299.589.010	98,72	298.330.884	98,31
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permuk	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Tra nsparansi dan Akuntabilitas	Rekomenda si Kebijakan	1	129.233.000	125.356.010	97	124.928.409	96,67
		Balai P3KP Sumatera IV	Rekomenda si Kebijakan	1	129.233.000	125.356.010	97	124.928.409	96,67
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan peruma han dan kawasan permuki man	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko da n Pencegahan Korupsi	Rekomenda si Kebijakan	1	174.233.000	174.233.000	100	173.402.475	99,52
		Balai P3KP Sumatera IV	Rekomenda si Kebijakan	1	174.233.000	174.233.000	100	173.402.475	99,52

Sumber : Analisis 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbandingan antara Target dan Capaian kinerja pada Triwulan IV. Target Kinerja untuk DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada Triwulan IV ditetapkan sebesar 98,72%, dengan capaian per 31 Desember 2025 sebesar 98,31%. Terdapat selisih antara capaian dan target sebesar -0,41% dibawah rencana, dengan kata lain target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi pada Triwulan IV masih belum tercapai, tetap perlu dilakukan evaluasi ke depannya sebagai langkah optimalisasi penyerapan anggaran.

2.3 PERMASALAHAN/POTENSI CAPAIAN TRIWULAN IV

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERMASALAHAN
A. Meningkatnya layanan dukungan manajemen		
Tingkat layanan dukungan manajemen	1 Layanan	Daya Listrik pada Kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak mencukupi kebutuhan, sehingga sering drop
B. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman		
Tingkat layanan dukungan manajemen	1 Layanan	Daya Listrik pada Kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak mencukupi kebutuhan, sehingga sering drop
Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	Terlambatnya pengumpulan laporan bulanan dan laporan tahunan oleh para Koordinator Kota dan Kabupaten serta Tenaga Fasilitator Lapangan Kota dan Kabupaten, sehingga bahan-bahan pelaporan menjadi terlambat

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERMASALAHAN
Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	268 Unit	Permasalahan Administratif: Terdapat satu Penerima Bantuan (PB) di Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur (atas nama Permata) yang mengundurkan diri secara resmi dikarenakan ketidakanggupan mengikuti aturan juknis BSPS.
		Akses Jalan: Desa Rantau Jaya dan Trimulyo mengalami keterlambatan pengiriman bahan akibat akses jalan yang baru dibuka pasca perbaikan pada 6 Desember 2025. Kerusakan jalan yang parah dan penutupan jalan juga menghambat distribusi di Desa Nipah Panjang I, Nipah Panjang II, Bangun Karya, Pematang Mayan, Sungai Jambat, dan Sungai Sayang.
		Ketersediaan Material: Teridentifikasi kelangkaan atau keterlambatan spesifik pada material seng (Desa Saimpang Jelita), batu bata (Desa Bangun Karya, Pematang Mayan), dan kayu (Desa Sungai Jambat, Sungai Sayang).
		Kendala Alam: Faktor banjir dan banjir ROB menjadi penghambat utama progres fisik di Desa Nipah Panjang I, Nipah Panjang II, Sungai Jambat, dan Sungai Sayang.
		Kendala Sosial: Di Desa Trijaya, terdapat 1 unit (progres
C. Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan		
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	Terlambatnya pengumpulan laporan bulanan dan laporan tahunan oleh para Koordinator Kota dan Kabupaten serta Tenaga Fasilitator Lapangan Kota dan Kabupaten, sehingga bahan-bahan pelaporan menjadi terlambat
D. Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan		
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Laporan	Terlambatnya pengumpulan laporan bulanan dan laporan tahunan oleh para Koordinator Kota dan Kabupaten serta Tenaga Fasilitator Lapangan Kota dan Kabupaten, sehingga bahan-bahan pelaporan menjadi terlambat





INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERMASALAHAN
Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan		Pengunduran Diri: Tercatat tiga kasus pengunduran diri karena ketidakanggupan mengikuti aturan, yaitu dua PB di Desa Pematang Kabau (Kab. Sarolangun) dan satu PB di Desa Teluk Singkawang (Kab. Tebo).
		Pergantian PB: Di Kabupaten Sarolangun, mekanisme penggantian (reshuffle) telah dilakukan melalui SK Dirjen Perumahan Perdesaan tertanggal 21 November 2025. Dari daftar pengganti tersebut, tiga PB dilaporkan meninggal dunia (Desa Bukit Suban, Simpang Kertopati, Sungai Gedang) dan telah dialihkan kepada ahli waris dengan konstruksi yang sudah berjalan.
		Faktor Alam (Cuaca & Pasang Surut): Curah hujan tinggi dan kondisi air sungai pasang menjadi penyebab utama terhambatnya mobilisasi material (pasir dan kerikil) di Kabupaten Sarolangun (Desa Bukit Suban, Pematang Kabau, Simpang Kertopati, Butang Baru, Petiduran Baru, Jati Baru Mudo). Kondisi cuaca hujan juga secara umum menghambat pekerjaan fisik di Kabupaten Muaro Jambi, Merangin, Batanghari, dan Bungo.
		Rantai Pasok Material: Keterlambatan material akibat akses dan cuaca terjadi secara masif. Kendala spesifik meliputi material batu bata (Desa Berkun, Meribung, Napal Melintang, Siliwangi, Tanjung Baru, Suka Makmur) dan pasir (Desa Tiaro, Sungai Gedang).
		Tenaga Kerja: Di Kabupaten Batanghari dan Bungo, progres fisik terhambat akibat faktor tukang yang sakit atau sistem kerja tukang yang bergiliran, menyebabkan penyelesaian unit rumah menjadi lebih lambat.
E. Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	Terlambatnya pengumpulan laporan bulanan dan laporan tahunan oleh para Koordinator Kota dan Kabupaten serta Tenaga Fasilitator Lapangan Kota dan Kabupaten, sehingga bahan-bahan pelaporan menjadi terlambat
F. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan		





INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERMASALAHAN
Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	1 Unit	Keterlambatan Finalisasi Design Bangunan: Design Bangunan oleh Pusat terlambat finalisasi, sehingga waktu pelaksanaan proyek dan pembangunan rumah susun mundur
		Keterlambatan Progres (Deviasi Negatif): Terjadi deviasi minus sebesar -0,09%, di mana realisasi di lapangan hanya mencapai 0,16% dari target rencana sebesar 0,25%.
G. Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan		
Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	219 Unit	Permasalahan Keuangan (Upah Tukang): Terdapat kendala pencairan upah Kepala Tukang di Desa Koto Bento dan Desa Koto Keras melalui Bank BNI. Hal ini menjadi krusial mengingat Kepala Tukang Desa Koto Bento berencana meninggalkan lokasi untuk pekerjaan lain, dan Kepala Tukang Desa Koto Keras telah pindah domisili ke Medan.
		Hambatan Cuaca: Curah hujan yang tinggi menyebabkan keterlambatan progres fisik (masih pada kisaran 0-30%) di lima desa, yaitu Desa Baru Debai, Air Teluh, Kumun Hilir, Pondok Agung, dan Pondok Tinggi.





2.4 REALISASI TERHADAP TARGET RENSTRA 2025

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	INDIKASI LOKASI	2025	
-1	-2	-3	RN	RL	
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan					
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:					
1 Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi					
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak					
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi					
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV					
OUTPUT KEGIATAN:					
1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan	BALAI	1	1
2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen	0	0	
3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja	Laporan	BALAI	3	1
4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Laporan		0	
5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Kegiatan	BALAI	1	1
6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan		0	
7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen		0	
8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	BALAI, BK	2	3
9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		0	1
10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan		0	3
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyediaan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum					
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya akses penyediaan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV					
OUTPUT KEGIATAN:					
1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit			
2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit		-	
3	Jumlah dokumen teknis penyediaan lahan dan PSU	Dokumen		-	
4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyediaan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen		-	
5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen		-	
6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyediaan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni					
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni					
OUTPUT KEGIATAN:					
1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit		1.051	1.645
2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit		-	
3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit		16	-
4	Jumlah dokumen teknis penyediaan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman	Laporan		-	
5	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh	Laporan	BALAI, BENGKULU	3	3
6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan		-	
7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan		-	
8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan		-	
9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan		2	-
10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1
11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan					
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terasiliasi Pembiayaan Perumahan					
OUTPUT KEGIATAN:					
1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS					
2 Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu					
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh					
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh					
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu					
OUTPUT KEGIATAN:					
1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	BKL	0	0,1
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS					
3 Persentase berwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan					
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman					
KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman					
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman					
OUTPUT KEGIATAN:					
1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan		-	
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel					
OUTPUT KEGIATAN:					
1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan	BALAI	1	1
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman					
OUTPUT KEGIATAN:					
1	Jumlah penerapan manajemen risiko	Rekomendasi Kebijakan	BALAI	1	1
2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Rekomendasi Kebijakan		-	
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman					
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS					
1 Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman					
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV					
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV					
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV					
OUTPUT KEGIATAN:					
1	Jumlah Layanan Perhantoran (Sekretariat Jenderal)	Layanan	BALAI	3	3
2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Layanan		3	-
3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	Layanan		-	
4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan		-	
5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan		-	
6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Layanan		3	-
7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	Layanan		-	
8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan		-	
9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan		-	
10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	Layanan		-	
11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan		-	
12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan		-	





BAB III

PENUTUP



BAB III PENUTUP

1. RENCANA TINDAK LANJUT

INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
A. Meningkatnya layanan dukungan manajemen		
Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	Daya Listrik pada Kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak mencukupi kebutuhan, sehingga sering drop	Koordinasi dengan Pihak Terkait: Melaksanakan Rapat Koordinasi progress dan pelaporan bulanan Percepatan Pelaporan: Percepatan pembentukan laporan bulanan TFL dan Koordinator, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan perumahan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi
B. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman		
Jumlah Laporan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Terlambatnya pengumpulan laporan bulanan dan laporan tahunan oleh para Koordinator Kota dan Kabupaten serta Tenaga Fasilitator Lapangan Kota dan Kabupaten, sehingga bahan-bahan pelaporan menjadi terlambat	Koordinasi dengan Pihak Terkait: Melaksanakan Rapat Koordinasi progress dan pelaporan bulanan Percepatan Pelaporan: Percepatan pembentukan laporan bulanan TFL dan Koordinator, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan perumahan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi
Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Permasalahan Administratif: Terdapat satu Penerima Bantuan (PB) di Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur (atas nama Permata) yang mengundurkan diri secara resmi dikarenakan ketidakmampuan mengikuti aturan juknis BSPS.	Pemindahbukuan Dana: Melakukan pemindahbukuan dana bantuan dari Rekening Penerima Bantuan kembali ke Rekening Penyaluran (RPL) Satker. Koordinasi dengan Dirjen KP: Melakukan Koordinasi dengan Dirjen KP terkait SK Pengganti CPB
	Akses Jalan: Desa Rantau Jaya dan Trimulyo mengalami keterlambatan pengiriman bahan akibat akses jalan yang baru dibuka pasca perbaikan pada 6 Desember 2025. Kerusakan jalan yang parah dan penutupan jalan juga menghambat distribusi di Desa Nipah Panjang I, Nipah Panjang II, Bangun Karya, Pematang Mayan, Sungai Jambat, dan Sungai Sayang.	Melakukan koordinasi intensif dengan Penyedia untuk segera mengirimkan kekurangan bahan pada saat jeda
	Ketersediaan Material:	

INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	Teridentifikasi kelangkaan atau keterlambatan spesifik pada material seng (Desa Saim pang Jelita), batu bata (Desa Bangun Karya, Pematang Mayan), dan kayu (Desa Sungai Jambat, Sungai Sayang). Kendala Alam: Faktor banjir dan banjir ROB menjadi penghambat utama progres fisik di Desa Nipah Panjang I, Nipah Panjang II, Sungai Jambat, dan Sungai Sayang. Kendala Sosial: Di Desa Trijaya, terdapat 1 unit (progres 0-30%) yang terkendala karena PB tergolong lansia dan berkebutuhan khusus, sehingga pelaksanaan fisik masih menunggu jadwal gotong royong warga setempat.	Mendorong Gotong Royong dalam Menyelesaikan Masalah KPB: Mendesak pelaksanaan gotong royong bagi PB lansia/disabilitas mengingat sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran yang semakin mendesak.
C. Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan		
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Terlambatnya pengumpulan laporan bulanan dan laporan tahunan oleh para Koordinator Kota dan Kabupaten serta Tenaga Fasilitator Lapangan Kota dan Kabupaten, sehingga bahan-bahan pelaporan menjadi terlambat	Koordinasi dengan Pihak Terkait: Melaksanakan Rapat Koordinasi progress dan pelaporan bulanan Percepatan Pelaporan: Percepatan pembentukan laporan bulanan TFL dan Koordinator, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan perumahan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi
D. Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan		
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Terlambatnya pengumpulan laporan bulanan dan laporan tahunan oleh para Koordinator Kota dan Kabupaten serta Tenaga Fasilitator Lapangan Kota dan Kabupaten, sehingga bahan-bahan pelaporan menjadi terlambat	Koordinasi dengan Pihak Terkait: Melaksanakan Rapat Koordinasi progress dan pelaporan bulanan Percepatan Pelaporan: Percepatan pembentukan laporan bulanan TFL dan Koordinator, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan perumahan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi
Jumlah Rumah Swadaya Perumahan	Pengunduran Diri: Tercatat tiga kasus pengunduran diri karena ketidakmampuan mengikuti aturan, yaitu dua PB di Desa Pematang Kabau (Kab. Sarolangun) dan satu PB di Desa Teluk Singkawang (Kab. Tebo).	Koordinasi dengan Dirjen Perumahan Perdesaan: Satker menunggu instruksi lebih lanjut dari Dirjen Perumahan Perdesaan terkait status dana (apakah dicarikan pengganti atau dikembalikan ke negara). Hal ini merujuk pada Surat Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Resiko No. RU1003-Dt/206 tanggal 28 November 2025 poin h, yang menyatakan usulan pergantian CPB/PB setelah

INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		tanggal 17 November 2025 tidak diperkenankan lagi. Pemindahbukuan Dana: Dana langsung dipindahbukukan dari Rekening PB ke Rekening Penyaluran (RPL) Satker, dengan merujuk pada dasar hukum surat Dirjen yang sama (batas waktu 17 November 2025).
	Pergantian PB: Di Kabupaten Sarolangun, mekanisme penggantian (reshuffle) telah dilakukan melalui SK Dirjen Perumahan Perdesaan tertanggal 21 November 2025. Dari daftar pengganti tersebut, tiga PB dilaporkan meninggal dunia (Desa Bukit Suban, Simpang Kertopati, Sungai Gedang) dan telah dialihkan kepada ahli waris dengan konstruksi yang sudah berjalan.	Pendampingan dalam Percepatan: Melakukan pendampingan intensif untuk percepatan pelaksanaan fisik agar progres tidak tertinggal jauh, mengingat waktu pelaksanaan yang sangat terbatas.
	Faktor Alam (Cuaca & Pasang Surut): Curah hujan tinggi dan kondisi air sungai pasang menjadi penyebab utama terhambatnya mobilisasi material (pasir dan kerikil) di Kabupaten Sarolangun (Desa Bukit Suban, Pematang Kabau, Simpang Kertopati, Butang Baru, Petiduran Baru, Jati Baru Mudo). Kondisi cuaca hujan juga secara umum menghambat pekerjaan fisik di Kabupaten Muaro Jambi, Merangin, Batanghari, dan Bungo.	Koordinasi dengan Toko Penyedia: Berkoordinasi dengan toko penyedia bangunan untuk memprioritaskan pengiriman item spesifik (pasir/batu bata) segera setelah kondisi cuaca/air sungai surut.
	Rantai Pasok Material: Keterlambatan material akibat akses dan cuaca terjadi secara masif. Kendala spesifik meliputi material batu bata (Desa Berkun, Meribung, Napal Melintang, Siliwangi, Tanjung Baru, Suka Makmur) dan pasir (Desa Tiara, Sungai Gedang).	Pembuatan Surat Pernyataan Komitmen Toko Penyedia: Di Kabupaten Muaro Jambi, langkah preventif dilakukan dengan
	Tenaga Kerja: Di Kabupaten Batanghari dan Bungo, progres fisik terhambat akibat faktor tukang yang sakit atau sistem kerja tukang yang bergiliran, menyebabkan penyelesaian unit rumah menjadi lebih lambat.	Memberikan Saran pada PB: Menyarankan PB untuk mencari tukang pengganti/tambahan (tidak menunggu giliran) agar pekerjaan tidak terhenti. Memberikan Saran pada PB: Menyiasati jam kerja tukang dengan memaksimalkan pengerjaan saat kondisi tidak hujan.

INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
E. Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Terlambatnya pengumpulan laporan bulanan dan laporan tahunan oleh para Koordinator Kota dan Kabupaten serta Tenaga Fasilitator Lapangan Kota dan Kabupaten, sehingga bahan-bahan pelaporan menjadi terlambat	Koordinasi dengan Pihak Terkait: Melaksanakan Rapat Koordinasi progress dan pelaporan bulanan Percepatan Pelaporan: Percepatan pembentukan laporan bulanan TFL dan Koordinator, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan perumahan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi
F. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan		
Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Keterlambatan Finalisasi Design Bangunan: Design Bangunan oleh Pusat terlambat finalisasi, sehingga waktu pelaksanaan proyek dan pembangunan rumah susun mundur	Koordinasi dengan Pusat: Koordinasi percepatan, Namun Timeline untuk memulai pelaksanaan proyek tetap terlambat
	Keterlambatan Progres (Deviasi Negatif): Terjadi deviasi minus sebesar -0,09%, di mana realisasi di lapangan hanya mencapai 0,16% dari target rencana sebesar 0,25%.	Finalisasi Data Awal: Kontraktor dan Konsultan diwajibkan segera menyelesaikan laporan pengukuran <i>Uitzet</i> dan perhitungan MC-0 (<i>Mutual Check 0</i>). Penguatan Administrasi & Pengawasan: Konsultan Pengawas harus segera melengkapi dokumen administrasi (Berita Acara, Persetujuan Material, dll) dan melakukan koordinasi intensif terkait sinkronisasi data teknis (Gambar dan RAB).
	Kekurangan Tenaga Kerja: Jumlah tenaga kerja di lapangan dinilai belum optimal (saat ini berjumlah 9 orang).	Akselerasi Sumber Daya: Kontraktor wajib menambah jumlah personel tenaga kerja serta mempercepat pengadaan material besi beton untuk kebutuhan fabrikasi struktur hingga lantai 2.
	Mobilisasi Material Lambat: Kecepatan mobilisasi material utama di lapangan masih kurang memadai untuk mendukung percepatan pekerjaan.	Disiplin Pelaporan: Penerapan mekanisme pelaporan yang ketat sesuai jadwal <i>cut-off</i> hari Minggu, pelaporan ke Satker hari Senin, dan pelaporan ke Pusat hari Selasa untuk validitas data pemantauan.
G. Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan		

INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	Permasalahan Keuangan (Upah Tukang): Terdapat kendala pencairan upah Kepala Tukang di Desa Koto Bento dan Desa Koto Keras melalui Bank BNI. Hal ini menjadi krusial mengingat Kepala Tukang Desa Koto Bento berencana meninggalkan lokasi untuk pekerjaan lain, dan Kepala Tukang Desa Koto Keras telah pindah domisili ke Medan.	Koordinasi dengan Pihak Terkait: Mencari solusi terbaik melalui koordinasi segitiga antara Satker/PPK dan Bank Penyalur (BNI) untuk memastikan hak tukang terbayarkan tanpa harus melakukan pergantian personil administrasi yang rumit.
	Hambatan Cuaca: Curah hujan yang tinggi menyebabkan keterlambatan progres fisik (masih pada kisaran 0-30%) di lima desa, yaitu Desa Baru Debai, Air Teluh, Kumun Hilir, Pondok Agung, dan Pondok Tinggi.	Instruksi Percepatan Pelaksanaan Fisik: Menginstruksikan Penerima Bantuan untuk segera mempercepat pelaksanaan fisik (lembur/tambah tenaga) seketika kondisi cuaca membaik, karena batas waktu penyelesaian sudah sangat kritis.



LAMPIRAN



DOKUMENTASI KEGIATAN

No.	Kegiatan	Dokumentasi
1	<i>Sosialisasi dan Penandatanganan Kontrak TFL BPSD Provinsi Jambi TA 2025</i> <i>10 September 2025</i>	
2	<i>Survey Harga Toko untuk</i> <i>19 September 2025</i>	
3	<i>Survey Lokasi Rumah Susun MA Jambi</i> <i>23 September 2025</i>	

No.	Kegiatan	Dokumentasi
4	<i>Survey Harga HPS Batching Plan dan Bahan Bangunan Rumah Susun</i> <i>30 September 2025</i>	
5	<i>Seremoni Pelaksanaan BSPS TA 2025 di Kota Sungai Penuh</i> <i>04 Oktober 2025</i>	
6	<i>Rapat Koordinasi Pembinaan Teknis Pelaksanaan BSPS di Provinsi Jambi Deliniasi Perdesaan TA 2025</i> <i>29 Oktober 2025</i>	
7	<i>Pemantauan Pelaksanaan BSPS di Provinsi Jambi Deliniasi Perdesaan TA 2025</i> <i>30 Oktober 2025</i>	

No.	Kegiatan	Dokumentasi
8	<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BSPS di Muaro Jambi Provinsi Jambi TA 2025</i> <i>10 November 2025</i>	
9	<i>Pengecekan Lahan CNC Lahan Usulan MA Rumah Susun MA Provinsi Jambi</i> <i>11 November 2025</i>	
10	<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BSPS di KAB. Batanghari Provinsi Jambi TA 2025</i> <i>11 November 2025</i>	
11	<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BSPS di Kab. Muaro Jambi TA 2025</i> <i>12 November 2025</i>	

No.	Kegiatan	Dokumentasi
12	<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BPS di Kab. Tebo Provinsi Jambi TA 2025</i> <i>13 November 2025</i>	
13	<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BPS di Kab. Kerinci Provinsi Jambi TA 2025</i> <i>14 November 2025</i>	
14	<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BPS di Kota Jambi Provinsi Jambi TA 2025</i> <i>14 November 2025</i>	
15	<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BPS di Kota Jambi Provinsi Jambi TA 2025</i> <i>14 November 2025</i>	

No.	Kegiatan	Dokumentasi
16	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BSPS di Kota Jambi Provinsi Jambi TA 2025 27 November 2025	
17	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BSPS di Kab. Sarolangun Provinsi Jambi TA 2025 04 Desember 2025	
18	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BSPS di Kab. Sarolangun Provinsi Jambi TA 2025 04 Desember 2025	
19	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BSPS di Kab. Merangin Provinsi Jambi TA 2025 05 Desember 2025	

No.	Kegiatan	Dokumentasi
20	<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BSPS di Kab. Bungo Provinsi Jambi TA 2025</i> <i>05 Desember 2025</i>	
21	<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BSPS di Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi TA 2025</i> <i>09 Desember 2025</i>	
22	<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BSPS di Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi TA 2025</i> <i>09 Desember 2025</i>	
23	<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BSPS di Kab. Tanjung Jabung Timuri Provinsi Jambi TA 2025</i> <i>10 Desember 2025</i>	

No.	Kegiatan	Dokumentasi
24	<i>Kunker DPR RI Edi Purwanto di Kab. Sarolangun</i> <i>15-16 Desember 2025</i>	
25	<i>Penandatanganan Kontrak MK PT Alocita Mandiri</i> <i>18 Desember 2025</i>	
26	<i>Rapat Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Jambi TA 2025</i> <i>17-19 Desember 2025</i>	
27	<i>Penandatanganan Kontrak Pelaksanaan Fisik CV Riau Andalan Utama</i> <i>19 Desember 2025</i>	

No.	Kegiatan	Dokumentasi
28	<i>Pre Construction Meeting (PCM) Rumah Susun MA Provinsi Jambi 22 Desember 2025</i>	
29	<i>Penyerahan Lahan Rumah Susun MA Provinsi Jambi 22 Desember 2025</i>	